

Katalog : 3102017.82

# Indeks

## Pembangunan Gender Provinsi Maluku Utara

2020



BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI MALUKU UTARA



# Indeks

Pembangunan Gender  
Provinsi Maluku Utara

2020





---

---

## Indeks Pembangunan Gender Provinsi Maluku Utara 2020

**No. Publikasi** : 82000.2116  
**Katalog** : 3102017.82  
**Ukuran Buku** : 18,2 x 25,7 cm  
**Jumlah Halaman** : xvi + 63 halaman

**Naskah** : BPS Provinsi Maluku Utara  
**Penyunting** : BPS Provinsi Maluku Utara  
**Desain Kover** : BPS Provinsi Maluku Utara  
**Diterbitkan oleh** : ©BPS Provinsi Maluku Utara  
**Dicetak oleh** : BPS Provinsi Maluku Utara

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.



## **Indeks Pembangunan Gender Provinsi Maluku Utara 2020**

### **Tim Penyusun:**

#### **Pengarah:**

Aidil Adha, SE, ME

#### **Penanggung Jawab:**

Achmad Sobari, SST, SE, M.Si

#### **Penyunting:**

Achmad Sobari, SST, SE, M.Si

#### **Penulis:**

Soraya Diana Uli, SST

#### **Desain dan Tataletak Layout:**

Syaifudin Karyadi, S.Si





## Kata pengantar

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Maluku Utara 2020 merupakan publikasi baru yang dibuat BPS Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021. Publikasi ini memberikan gambaran mengenai perkembangan capaian pembangunan manusia berbasis gender di Provinsi Maluku Utara. Sebagai pelengkap, diinformasikan juga tingkat keberhasilan dari pelaksanaan pemberdayaan perempuannya.

Diharapkan dengan diterbitkannya publikasi Indeks Pembangunan Gender Provinsi Maluku Utara 2020 dapat menjadi bahan yang memperkaya literatur, sekaligus alat evaluasi pembangunan gender di Maluku Utara.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan publikasi ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga publikasi Indeks Pembangunan Gender Provinsi Maluku Utara 2020 dapat memberikan manfaat kepada segenap pengguna data.

**Ternate, Juni 2021**  
**Kepala Badan Pusat Statistik**  
**Provinsi Maluku Utara,**



Aidhil Adha, SE ME







## Daftar Isi

Kata pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Gambar .....	xiii
Daftar Lampiran .....	xv
Bab I_Pendahuluan .....	3
Latar Belakang .....	3
Bias Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan (Bias Gender) .....	3
Upaya Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan .....	4
Kesetaraan Gender Menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) .....	5
Kesetaraan Gender Menjadi Tujuan dalam RPJMN 2020-2024 .....	6
Kesetaraan Gender dan RPJMD 2020-2024 .....	8
BAB II_Pengukuran Pembangunan Gender .....	11
Implementasi IPG Metode Baru di Indonesia .....	11
Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum .....	12
Penghitungan IPG Metode Baru .....	12
Perubahan Interpretasi .....	13
BAB III_Gambaran Umum Pembangunan Gender .....	17
Tidak Ada Perbedaan Perlakuan Dalam Bidang Kesehatan .....	17
Perempuan Tertinggal Dalam Bidang Pendidikan .....	19
Dinamika Ketenagakerjaan .....	21
Kesempatan Dalam Bidang Politik .....	23
BAB IV_Capaian Keberhasilan Pembangunan Gender .....	27
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan .....	27
Perkembangan Capaian Pembangunan Gender .....	27
Pembangunan Gender Belum Sepenuhnya Diikuti Oleh Pemberdayaan Gender .....	28
Capaian Pembangunan Gender Kabupaten/Kota .....	29
Tipologi Klassen IPM, IPG dan IDG Kabupaten/Kota .....	31
Posisi IPG dan IDG Maluku Utara di Tengah Provinsi Lainnya .....	33
Bab V_Kesimpulan .....	37
Daftar Pustaka .....	39
Lampiran .....	41









## Daftar Tabel

Tabel 1.1 Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru .....	11
Tabel 1.2 Nilai Minimum dan Maksimum.....	12
Tabel 3.1 Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja per Bulan Tahun 2010-2020 .....	22
Tabel 4.1 Provinsi Berperingkat 10 Besar IPM, IPM Perempuan, IPG, dan IDG Tahun 2020 .....	34

<https://malut.bps.go.id>







## Daftar Gambar

Gambar 1.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).....	5
Gambar 1.2 Visi, Misi, Arahana Presuden Serta Agenda Pembangunan 2020-2024.....	7
Gambar 3.1 Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2020 (Tahun).....	18
Gambar 3.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2020 (Tahun).....	20
Gambar 3.3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2020 .....	20
Gambar 3.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Tahun 2020.....	21
Gambar 3.5 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2020 (Tahun).....	21
Gambar 3.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2020 (Tahun) .....	22
Gambar 4.1 Perkembangan IPG dan IPM Tahun 2010-2020 (Tahun) .....	28
Gambar 4.2 Perkembangan Kecepatan Peningkatan IPG dan IPM Tahun 2010-2020 (Persen).....	28
Gambar 4.3 Perkembangan IPG dan IDG Tahun 2010-2020 .....	29
Gambar 4.4 Perkembangan IPG Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020.....	30
Gambar 4.5 Perkembangan IPM Perempuan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020 .....	30
Gambar 4.6 Perkembangan IDG Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020 .....	31
Gambar 4.7 Tipologi Klassen IPM dan IPG Kabupaten/Kota Tahun 2020 .....	32
Gambar 4.8 Tipologi Klassen IDG dan IPG Kabupaten/Kota Tahun 2020.....	33









## Daftar Lampiran

Lampiran 1. IPG Menurut Komponen Tahun 2010-2020 .....	41
Lampiran 2. IPG Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010- 2020 .....	43
Lampiran 3. IPG Menurut Komponen dan Kabupaten/KotaTahun 2019-2020 .....	45
Lampiran 4. IDG Menurut Komponen Tahun 2010-2020 .....	51
Lampiran 5. IDG Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2020.....	52
Lampiran 6. IDG Menurut Komponen dan Kabupaten/KotaTahun 2019-2020 .....	54
Lampiran 7. IPG Provinsi se-Indonesia Menurut Komponen Tahun 2020.....	56
Lampiran 8. IDG Provinsi se-Indonesia Menurut Komponen Tahun 2020 .....	62

<https://malut.bps.go.id>



# Bab 1



## Pendahuluan

*"It is time that we all see gender as a spectrum  
• instead of two sets of opposing ideals"*



~ Emma Watson ~



# Bab I

## Pendahuluan

### Latar Belakang

Salah satu isu yang sering diperbincangkan akhir-akhir ini adalah gender. Mengapa isu ini muncul dan menjadi suatu perdebatan yang panjang? Hal tersebut dikarenakan dalam keseharian kata “gender” sering disalahartikan dengan perempuan dan segala hal yang berhubungan dengan perempuan. Hal ini secara tidak langsung telah menciptakan dikotomi antara laki-laki dan perempuan. Gender dianggap bentuk perlawanan perempuan terhadap laki-laki sehingga melawan kodrat dan menentang kehendak Ilahi. Hal ini membuat resistansi atau penolakan dari lingkungan sekitar terhadap gender.

Hal yang perlu diluruskan terlebih dahulu adalah perbedaan antara jenis kelamin (sex) dan gender. Jenis kelamin bersifat biologis dan pemberian Allah SWT sehingga manusia tidak bisa mengubah atau menolaknya (kodrat). Gender bukanlah perbedaan jenis kelamin (sex) melainkan perbedaan fungsi dan peran sosial yang dibentuk oleh masyarakat sekitar terhadap perempuan dan laki-laki yang melahirkan pembagian peran dan fungsi sosial yang berbeda. Pembagian peran dan fungsi sosial tersebut berdasarkan apa yang dianggap pantas dan tidak pantas dilakukan oleh perempuan dan laki-laki, yang diatur menurut nilai-nilai, norma, adat istiadat dan kebiasaan dalam masyarakat. Oleh karenanya gender bukanlah kodrat karena dapat dipertukarkan antara tempat satu dengan tempat lainnya, dan antara perempuan dan laki-laki.

### Bias Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan (Bias Gender)

Perbedaan peran, fungsi dan tugas laki-laki dan perempuan tidak menjadi masalah selama tidak merugikan salah satu pihak. Istilah kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam kajian isu gender lebih disukai karena menunjukkan pembagian tugas yang seimbang dan adil antara laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan atau ketimpangan *gender* terjadi ketika seseorang diperlakukan tidak adil berdasarkan gender yang dimiliki. Ketika seseorang tidak memiliki peluang dan kesempatan hingga manfaat yang sama hanya karena perbedaan gender, di situlah telah terjadi ketimpangan *gender*.

Bias gender tidak hanya terjadi para perempuan, tapi juga terhadap laki-laki. Khusus di Indonesia, bias gender lebih dirasakan oleh perempuan disebabkan nilai maupun norma yang berlaku dalam masyarakat telah membatasi gerak langkah perempuan untuk berperan aktif dalam kegiatan ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, organisasi dan lainnya. Ketika perempuan diposisikan tertinggal, tidak menjadi mitra sejajar laki-laki akan membawa ketidakharmonisan dalam kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam lingkungan kehidupan masyarakat secara umum.

Diskriminasi gender yang timbul dalam masyarakat antara lain berupa subordinasi, marjinalisasi, beban ganda, pelabelan bahkan kekerasan.

- Subordinasi bermakna suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Dalam kehidupan nyata, kaum perempuanlah yang mengalami subordinasi atau selalu “dinomorduakan” dikarenakan nilai-nilai sosial dan budaya di masyarakat telah memilah-milah peran laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan publik atau produksi. Ketika penghargaan sosial terhadap peran domestik berbeda dengan peran publik, sepanjang itu pula ketidakadilan masih berlangsung.

- Marginalisasi adalah suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan salah satu jenis kelamin dalam hal ini perempuan tidak bisa berbuat banyak bahkan mengambil peran penting dalam berbagai hal. Bila dikaitkan dengan pekerjaan maka akan menyebabkan kemiskinan pada perempuan. Hal ini terjadi karena perempuan yang mencari nafkah dianggap sebagai pencari nafkah tambahan sehingga mendapatkan gaji lebih rendah dari laki-laki, ditambah tingkat pendidikan perempuan yang rendah. Perempuan juga beresiko untuk diberhentikan dari pekerjaan karena alasan hamil dan melahirkan.
- Beban ganda (*double burden*) artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Ketika perempuan memutuskan untuk bekerja dan meniti karir tertentu tidak semata lepas dari peran domestik atau reproduksi karena seringkali dianggap peran tersebut bersifat statis dan permanen. Berbagai upaya telah dilakukan dengan mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada perempuan lain, seperti asisten rumah tangga atau anggota keluarga perempuan lainnya. Namun demikian, tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan sehingga memberikan beban yang berlipat ganda kepadanya.
- Pelabelan negatif (*stereotype*) adalah pemberian citra baku/label/cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah sehingga mendatangkan kerugian bagi yang bersangkutan. Pelabelan acapkali dijadikan pembenaran atas tindakan dari seseorang/kelompok kepada orang/kelompok lainnya dengan harapan dapat menguasainya. Pelabelan negatif terhadap perempuan kerap terjadi di lingkungan masyarakat seperti anggapan bahwa : perempuan dianggap emosional sedangkan laki-laki merupakan makhluk rasional, perempuan dianggap lemah dalam arti fisik, mental, pemikiran juga ekonomi sehingga dianggap tidak mampu memimpin dan tidak bisa mengambil keputusan penting.
- Permasalahan lain adalah kekerasan (*violence*) baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Adanya anggapan bahwa perempuan itu lemah, seringkali dijadikan alasan untuk diperlakukan semena-mena, berupa tindakan kekerasan baik fisik maupun non fisik yang keduanya menyebabkan luka, rasa sakit, trauma bahkan kematian. Kekerasan yang menimpa perempuan biasanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perkosaan, pelecehan seksual, prostitusi dan eksploitasi seks.

## Upaya Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan

Berbagai perlakuan diskriminatif terhadap kaum perempuan merupakan fenomena sosial yang kerap terjadi dan dialami oleh kaum perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari masyarakat melihat atau mendengar pemberitaan terkait kekerasan terhadap perempuan melalui media baik cetak maupun elektronik. Untuk mengurai segala bentuk diskriminasi, kekejaman/kekerasan terhadap kaum perempuan, diperlukan kehadiran dan peran hukum sebagai salah satu instrumen untuk melindungi kaum perempuan dan mendistribusikan hak-hak serta keadilan bagi kaum perempuan.

Pentingnya menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan melalui perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan juga telah diakui secara internasional. Bahkan hal itu diwujudkan dalam konvensi tersendiri, yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 1979. CEDAW memuat 3 (tiga) prinsip utama: Pertama, *Prinsip Kesetaraan Substantif*, prinsip ini dikenal juga dengan pendekatan korektif yaitu pendekatan yang tidak berfokus pada perlakuan yang sama di depan hukum saja tetapi juga mencakup kesetaraan dalam arti *de jure* dampak aktual atau riil dari hukum. Kedua, *Prinsip Non-Diskriminasi*, pengertian diskriminasi dalam konvensi ini adalah setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin. Ketiga,

*Prinsip Kewajiban Negara* juga diartikan bahwa Negara ditempatkan sebagai aktor utama yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab.

Pada tingkat nasional upaya menghapus diskriminasi terhadap perempuan telah lama dilakukan dengan meletakkan hukum sebagai dasar kenegaraan. Dalam konsep negara hukum terdapat karakteristik yang kuat yaitu adanya kesamaan (*equality*) hak dalam berbagai aspek sosial, tanpa diskriminasi/membedakan jenis kelamin (gender). Hak konstitusional warga negara yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Selanjutnya Indonesia meratifikasi Konvensi CEDAW dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan.

### Kesetaraan Gender Menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Pemerintah mempunyai komitmen dalam memastikan pembangunan manusia Indonesia berbasis gender dengan memenuhi target pembangunan di tingkat global. Saat ini Indonesia menjalankan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs yang disahkan dalam sidang umum PBB pada September 2015 akan menjadi pedoman dalam pembuatan kebijakan politik negara-negara anggota PBB selama 15 tahun ke depan yang berlandaskan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Dengan berlakunya prinsip universalitas, integrasi dan inklusi untuk menyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang terlewat (*No-one Left-Behind*).

Gambar 1.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)



Sumber : <http://sdgs.bappenas.go.id>

SDGs memuat 17 tujuan yang terbagi ke dalam 169 target. Pembangunan berbasis gender tercantum secara eksplisit dalam tujuan ke-5, “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan dan Anak”. Adanya tujuan kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan SDGs menguatkan urgensi kesetaraan gender dalam pembangunan manusia. Hal ini tampak menjadi kesadaran seluruh bangsa yang menjadi anggota PBB, termasuk Indonesia, untuk memastikan segala diskriminasi berbasis gender harus diakhiri agar kemajuan negara melalui pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

Di dalam tujuan ke-5, SDGs menetapkan sejumlah target capaian yang menjadi indikator keberhasilan dari tujuan kesetaraan gender, yaitu (www.un.org, 2020):

1. Mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimanapun

2. Menghapuskan semua bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual dan berbagai jenis eksploitasi lainnya.
3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti anak, pernikahan dini dan paksa, serta mutilasi alat kelamin wanita.
4. Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.
5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat.
6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Program Aksi Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan dan Platform Aksi Beijing serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.
7. Melakukan reformasi untuk memberikan perempuan hak yang sama atas sumber daya ekonomi, serta akses ke kepemilikan dan kendali atas tanah dan bentuk properti lainnya, layanan keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional
8. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan
9. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang kuat dan perundang-undangan yang dapat ditegakkan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan

Selain secara eksplisit menjadi bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender juga terintegrasi secara implisit dalam sejumlah tujuan SDGs lainnya. Pada tujuan terkait penghapusan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan yang berkualitas, kesehatan dan kesejahteraan, air bersih dan sanitasi, ekonomi, industri, dan lingkungan, isu gender menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sejumlah tujuan SDGs tersebut hanya dapat dicapai secara maksimal jika kesetaraan gender terimplementasi di dalamnya.

### **Kesetaraan Gender Menjadi Tujuan dalam RPJMN 2020-2024**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN 2020-2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Selanjutnya, RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun



2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Diharapkan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan alur pemikiran di atas, dapat dilihat bahwa RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Visi, Misi, Arahan Presiden Serta Agenda Pembangunan 2020-2024



Sumber : <http://sdgs.bappenas.go.id>

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

Keempat pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
2. Gender

3. Modal Sosial dan Budaya
4. Transformasi Digital

Komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkesetaraan gender tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dengan pengarusutamaan gender (PUG). Hal ini merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

Sasaran pengarusutamaan gender dalam RPJMN 2020-2024 adalah terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan, ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masing-masing dari 90,99 dan 72,10 pada tahun 2018 menjadi 91,39 dan 74,18 pada tahun 2024.

### Kesetaraan Gender dan RPJMD 2020-2024

Seperti halnya Visi Misi Presiden, Visi Misi Gubernur Maluku Utara juga dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Maluku Utara 2020-2024. RPJMD tersebut telah diundangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020. Selaras dengan RPJPN 2005-2025 maka Visi Pembangunan Provinsi Maluku Utara yang akan dicapai selama tahun 2020-2024 adalah Maluku Utara Sejahtera.

Dalam rangka memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan Maluku Utara Sejahtera sebagai visi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara 2020-2024, maka ditetapkan misi pembangunan yaitu :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektifitas dan pengembangan wilayah;
3. Membangun tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis;
4. Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan;
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan.

Kesetaraan gender secara implisit disebutkan dalam tujuan pertama yaitu mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, daya saing tinggi, produktif, setara dan mengapresiasi kebudayaan dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 67,70 pada tahun 2018 menjadi 72,25 pada tahun 2024. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka disusunlah beberapa sasaran diantaranya sasaran keempat yaitu meningkatnya kualitas perempuan dan anak dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang meningkat dari 89,50 di tahun 2018 menjadi 92,79 di tahun 2024.



Bab **2**



# Pengukuran Pembangunan Gender

*“We've begun to raise daughters more like sons... but few have  
the courage to raise our sons more like our daughters”*

~ Gloria Steinem ~





## BAB II

### Pengukuran Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1995, lima tahun setelah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada saat itu, metode penghitungannya tidaklah dengan mengukur langsung ketimpangan antar gender, melainkan hanya mengukur disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap jenis kelamin. Hal ini menyebabkan angka IPG tidak bisa diinterpretasikan terpisah dari IPM. Hal ini berlangsung sampai tahun 2009 karena pada tahun 2010 UNDP menghentikan penghitungan IPG.

Pada tahun 2014, UNDP kembali melakukan penghitungan IPG dengan metode baru sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan metodologi penghitungan IPM. IPG metode baru melakukan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini mulai diperkenalkan IPM perempuan dengan IPM laki-laki serta rasio antara keduanya. Implikasinya, perbedaan pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dengan laki-laki terlihat jelas.

#### Implementasi IPG Metode Baru di Indonesia

Indonesia mengaplikasikan metode baru penghitungan IPM tersebut pada tahun 2015 dengan memperhatikan beberapa pertimbangan diantaranya:

1. Untuk dimensi kesehatan, telah tersedianya data Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir ( $e_0$ ) hasil proyeksi Sensus Penduduk (SP2010).
2. Pada dimensi pengetahuan, indikator yang digunakan adalah angka harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun dan angka rata-rata lama sekolah yang mengalami perubahan dimana sebelumnya mencakup penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi penduduk usia 25 tahun ke atas. Perubahan tersebut mempertimbangkan kondisi masih banyaknya masyarakat yang melakukan pendidikan pada rentang usia 15-25 tahun.
3. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data Susenas.
4. Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan Standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.

Tabel 1.1 Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru

DIMENSI	METODE LAMA		METODE BARU	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS)

	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp)	PNB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp)
Agregasi	Rata-rata Hitung $IPM = \frac{1}{3}(I_{kesehatan} + I_{pendidikan} + I_{pengeluaran})$		Rata-rata Ukur $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$	

### Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum

Dalam menghitung IPM, setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum. Penentuan nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing indikator menggunakan standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah. Berikut tabel yang menyajikan nilai tersebut.

Tabel 1.2 Nilai Minimum dan Maksimum

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Umur Harapan Hidup	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP \$)	1.007.436* (Rp)	107.721 (PPP \$)	26.572.352** (Rp)

Batas maksimum minimum mengacu pada UNDP kecuali indikator daya beli

Keterangan:

\* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

\*\* Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

### Penghitungan IPG Metode Baru

Penghitungan angka IPM laki-laki (IPM<sub>L</sub>) dan IPM perempuan (IPM<sub>P</sub>) sama seperti metode agregasi yang dilakukan dalam penghitungan angka IPM.

Indeks Kesehatan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$I_{kesehatan} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$$

Indeks Pengetahuan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$I_{\text{pengetahuan}} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

- $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$
- $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$

Indeks Pengeluaran dihitung dengan menggunakan rumus :

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

IPM laki-laki (IPM<sub>l</sub>)

$$IPM_l = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan } l} \times I_{\text{pendidikan } l} \times I_{\text{pengeluaran } l}}$$

IPM perempuan (IPM<sub>p</sub>)

$$IPM_p = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan } p} \times I_{\text{pendidikan } p} \times I_{\text{pengeluaran } p}}$$

Penghitungan IPG

$$IPG = \frac{IPM_p}{IPM_l}$$

## Perubahan Interpretasi

Akibat berubahnya metodologi penghitungan maka berubah pula interpretasi dari angka IPG. Angka IPG yang dihasilkan pada metode lama harus dibandingkan dengan angka IPM. Sehingga ketika selisih angka IPG dengan angka IPM semakin kecil maka menunjukkan ketimpangan kapabilitas antara laki-laki dan perempuan yang semakin rendah.

Seiring dengan perubahan metode maka interpretasi angka IPG juga berubah. Pada metode baru, semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100 maka semakin setara capaian pembangunan kapabilitas antara laki-laki dengan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jaraknya dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan kapabilitas antara laki-laki dan perempuan.









Bab **3**



## Gambaran Umum Pembangunan Gender

*“A woman is human. She is not better, wiser, stronger, more intelligent, more creative, or more responsible than a man. Likewise, she is never less. Equality is a given. A woman is human.”*



~ Vera Nazarian ~





## BAB III

### Gambaran Umum Pembangunan Gender

Seksolog asal Selandia baru yaitu John Money mencetuskan perbedaan penggunaan istilah jenis kelamin biologis dan gender sebagai peran pada tahun 1955. Definisi tersebut belum banyak diakui sebelum akhirnya pada dekade 1970-an ketika teori feminis mengangkat konsep perbedaan antara jenis kelamin biologis dan gender sebagai konstruksi sosial. Konstruksi sosial telah menempatkan perempuan secara tidak adil terhadap laki-laki. Perempuan dianggap sebagai bagian dari laki-laki dan harus berada di bawah kekuasaan, kontrol dan perlindungan laki-laki.

Adanya diskriminasi gender tersebut, menjadikan posisi perempuan nyaris tidak ada nilai. Padahal dengan jumlah perempuan yang banyak merupakan modal pembangunan yang potensial jika dikembangkan secara berkualitas. Perempuan memiliki peran strategis dalam kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat bahkan negara. Tetapi pada kenyataannya, kemampuan perempuan untuk menikmati dan berperan aktif dalam pembangunan masih terkendala dan masih menjadi masalah utama dalam pembangunan.

Untuk melihat bagaimana capaian perempuan dalam pembangunan maka perlu diawali dengan menampilkan gambaran umum mengenai perbedaan gender. Gambaran umum difokuskan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan perlakuan terhadap perempuan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

#### Tidak Ada Perbedaan Perlakuan Dalam Bidang Kesehatan

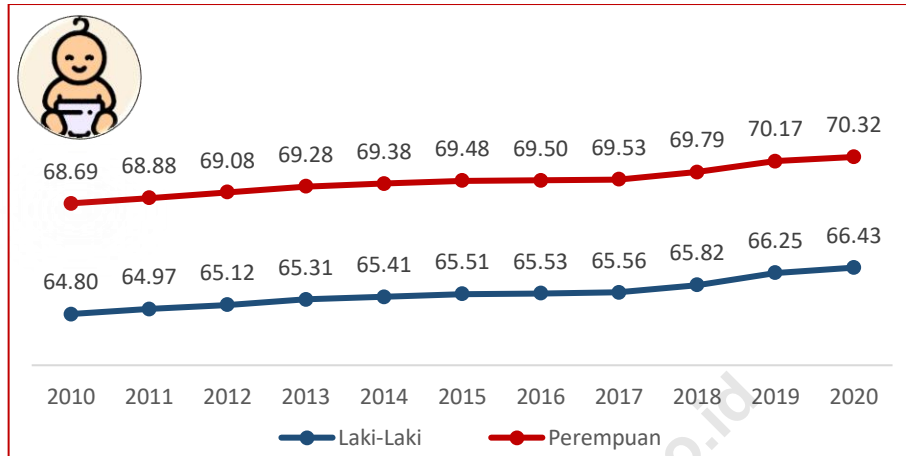
Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Begitu pentingnya, sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna. Kesehatan telah cukup lama dipahami sebagai salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Di kalangan ahli kesehatan di Indonesia, telah berkembang pemikiran untuk memasukkan kesehatan sebagai bagian dari “hak asasi manusia”, serta memperoleh jaminan konstitusi. Dengan jaminan konstitusi diharapkan perhatian Negara, dalam hal ini Pemerintah, akan jauh lebih besar terhadap pembangunan bidang kesehatan, sehingga kondisi kesehatan di Indonesia akan membaik.

Gagasan hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia terus berkembang baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan dinyatakan, “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal”. Sementara itu dalam Hukum Internasional telah dikembangkan berbagai instrumen hak asasi manusia, antara lain Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) yang ditetapkan pada tahun 1966. Dalam Pasal 12 ayat (1) Kovenan tersebut dinyatakan bahwa “setiap orang mempunyai hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental”

Akhirnya pada tahun 2000, melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, kesehatan ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam Pasal 28H ayat (1) dinyatakan, bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Masuknya ketentuan tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa. Kesehatan dipandang tidak lagi sekedar urusan pribadi yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, melainkan suatu hak hukum (*legal rights*).

Pemerintah harus berupaya menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu dapat hidup sehat sebagai wujud dari pemenuhan hak asasi tersebut. Pemerintah dapat memulainya dengan menyediakan sarana kesehatan yang memadai serta memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status ekonomi dan sosial termasuk gender.

Gambar 3.1 Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2020 (Tahun)



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, data diolah

Pemerintah terus berupaya memenuhi hak atas kesehatan bagi penduduk Maluku Utara. Hal terlihat dari Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk perempuan dan laki-laki selama tahun 2010-2020 terus mengalami peningkatan (Gambar 3.1). Hanya saja, kesenjangan yang terjadi antara UHH perempuan dan laki-laki ternyata tidak berubah, yakni masih sekitar empat tahun. Dalam hal ini, penduduk perempuan secara rata-rata akan hidup empat tahun lebih lama dibandingkan laki-laki.

Para ahli berpendapat bahwa terdapat aspek biologis dan gaya hidup yang memengaruhi perbedaan tingkat keberlangsungan hidup. Aspek ini disebut dengan "*female advantage*" atau kelebihan perempuan (Lemaire, 2002). Secara biologis pertumbuhan prenatal bayi perempuan lebih baik dibandingkan bayi laki-laki, sehingga memberikan kematangan fisik penuh saat dilahirkan dan membuatnya panjang umur. Sementara, pada bayi laki-laki, kematangan fisik mereka masih terus berkembang, sehingga mereka lemah dan rentan terhadap penyakit.

Selanjutnya perempuan memiliki gen dan hormon yang menguntungkan untuk hidup lama. Perempuan memiliki telomeres (bagian dalam kromosom) yang lebih panjang sehingga usia mereka lebih lambat daripada laki-laki dan memperlambat penuaan sel. Seorang wanita sepanjang hidupnya memiliki tingkat hormon yang berbeda, sehingga membantu dalam mengoptimalkan kesehatannya. Setelah melahirkan, perempuan mulai memproduksi tiroksin lebih banyak untuk menjaga kekebalan dan kesehatan. Selain itu tubuh perempuan mengeluarkan estrogen, yaitu hormon seks utamanya namun juga berguna untuk menjaga arteri dan pembuluh darah tetap bersih, kenyal dan kuat, sehingga mencegah masalah jantung. Sayangnya, jumlah estrogen pada laki-laki sering diabaikan. Beberapa hal inilah yang membuat perempuan lebih mungkin panjang umur dibanding laki-laki.

Perempuan lebih sadar mengenai kesehatannya dibanding laki-laki, sehingga sering mengunjungi dokter. Mereka juga penuh perhitungan dikarenakan memiliki lobus frontal (bagian dari otak yang berhubungan dengan tanggung jawab dan resiko perhitungan) lebih maju di korteks serebral. Hal inilah yang menyebabkan perempuan dapat mengambil keputusan lebih matang dan terukur dibanding laki-laki sehingga menghindarkannya dari cedera yang tak disengaja.

Sifat sosial yang dimiliki perempuan lebih kuat dibandingkan laki-laki, terlihat dari kebiasaannya untuk berbicara kepada orang lain terkait kekhawatiran yang dirasakannya. Ditunjang dengan antioksidan alami dalam tubuh mereka ternyata perpaduan keduanya berhasil mengurangi stress. Selain itu gaya hidup perempuan yang menjauhi rokok ditambah melakukan pekerjaan rumah tangga selepas menyelesaikan pekerjaan kantor menyebabkan fisik wanita dipaksa untuk aktif. Tentu, hal ini memberi perempuan keuntungan untuk panjang umur dibandingkan laki-laki.

### Perempuan Tertinggal Dalam Bidang Pendidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

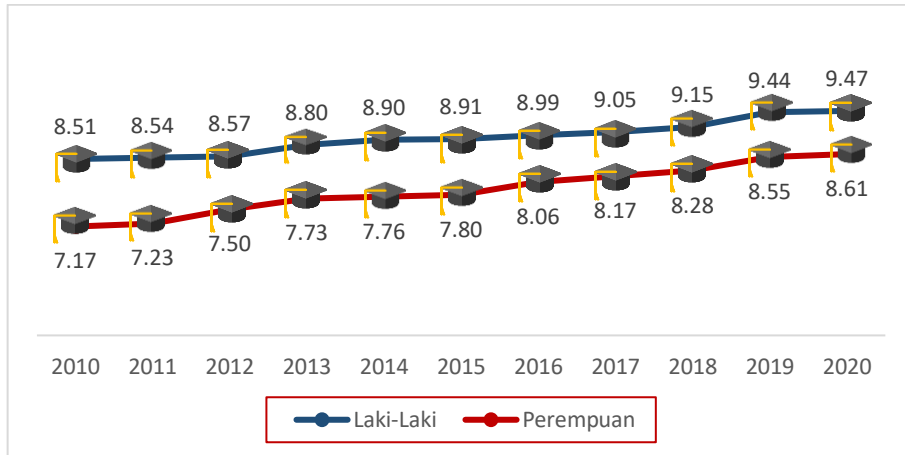
Dalam pandangan masyarakat, pendidikan saat ini adalah keniscayaan. Untuk bisa berhasil dalam kehidupan, manusia harus dibekali oleh pendidikan. Pendidikan akan membuka kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak sehingga mendapat penghasilan yang tinggi serta memperoleh tempat yang terhormat dalam masyarakat.

Setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya dilahirkan dengan hak yang sama karena itu, sudah seharusnya mereka memiliki akses yang sama pula dalam segala hal, diantaranya: pendidikan, pengambilan keputusan, kesehatan, dan pelayanan penting lainnya. Meskipun pemerintah telah memiliki kebijakan untuk memberantas buta huruf, tetap saja banyak anak-anak, remaja, dan dewasa yang tidak berpendidikan khususnya kaum perempuan.

Banyak faktor yang menjadi penyebab ketimpangan gender, seperti adat atau tradisi, agama, maupun kebijakan negara yang bias gender (Rosyidah & Dwisetyani: 2007). Sepatutnya segala hal yang menghambat kesempatan kaum perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya harus dihilangkan oleh pemerintah dan masyarakat. Diharapkan bekal pendidikan yang cukup tinggi dapat menjadikan perempuan sebagai agen perubahan dan bukan sekedar penerima program pemberdayaan secara pasif.

Kualitas pendidikan perempuan di Maluku Utara masih lebih rendah daripada laki-laki. Tercermin dari rata-rata lama sekolah penduduk perempuan usia 25 tahun ke atas yang lebih singkat dibandingkan laki-laki (Gambar 3.2). Secara rata-rata laki-laki sudah menikmati pendidikan selama 9,47 tahun atau hingga kelas IX atau setingkat kelas 3 pada sekolah menengah pertama, sedangkan perempuan menikmati pendidikan lebih cepat satu tahun yaitu selama 8,61 tahun atau kelas VIII atau setingkat kelas 2 pada sekolah menengah pertama.

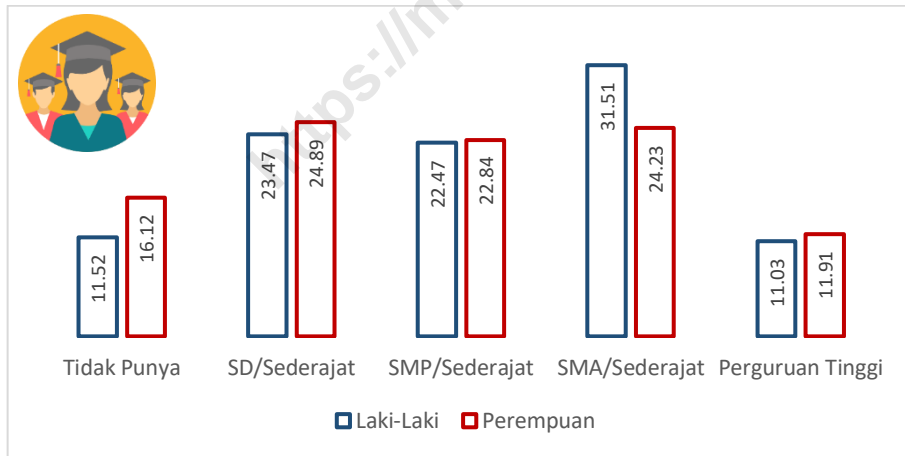
Gambar 3.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2020 (Tahun)



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, data diolah

Rendahnya kualitas pendidikan perempuan semakin terlihat bila diperhatikan komposisi penduduk usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan (Gambar 3.3). Terlihat bahwa kebanyakan kaum perempuan memiliki ijazah SD ke bawah. Sebaliknya, persentase lulusan SMA/Sederajat lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Untuk persentase lulusan SMP/Sederajat dan Perguruan Tinggi relatif tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Gambar 3.3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2020

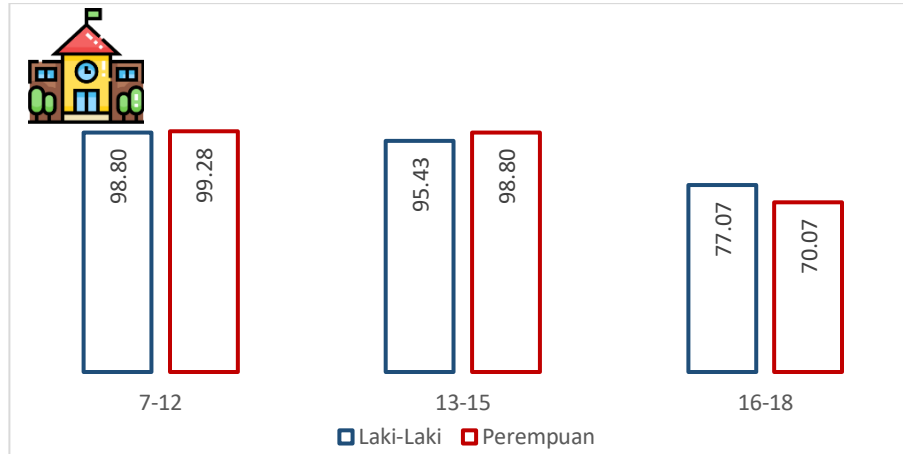


Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, data diolah

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi, budaya patriarki di tengah masyarakat mulai memudar. Kemajuan teknologi memberikan pilihan cara secara personal kepada perempuan untuk mengakses berbagai pengetahuan yang dibutuhkannya. Sehingga sekat-sekat psikologis, fisiologis dan geografis yang sering kali menghambat perempuan untuk mendapatkan pengetahuan, tereduksi secara perlahan-lahan. Hal ini tercermin dari data Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk perempuan tahun 2020 untuk kelompok usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun ternyata sudah lebih tinggi dibandingkan laki-laki.



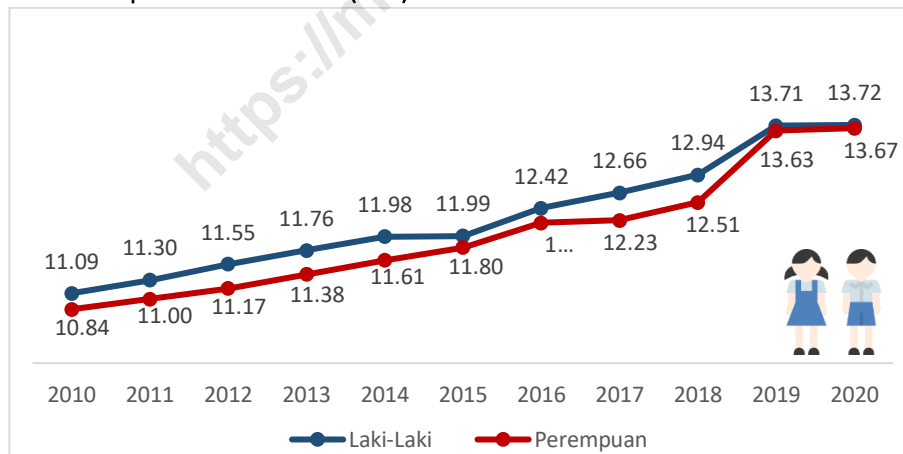
Gambar 3.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Tahun 2020



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, data diolah

Kecenderungan memudarnya budaya patriarki di tengah masyarakat semakin terkonfirmasi melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS menginformasikan gambaran capaian pembangunan di bidang pendidikan yang dapat dinikmati atau dicapai setiap anak di daerah tertentu. Semakin tinggi peluang sekolah pada anak maka pembangunan di bidang pendidikan semakin menunjukkan keberhasilannya. Adapun besarnya, terlihat bahwa HLS Perempuan terus mengalami peningkatan namun berada di bawah laki-laki sepanjang periode 2010-2020. Hanya saja, selisih antara HLS perempuan dan laki-laki mulai mengecil sejak dua tahun terakhir.

Gambar 3.5 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2020 (Tahun)



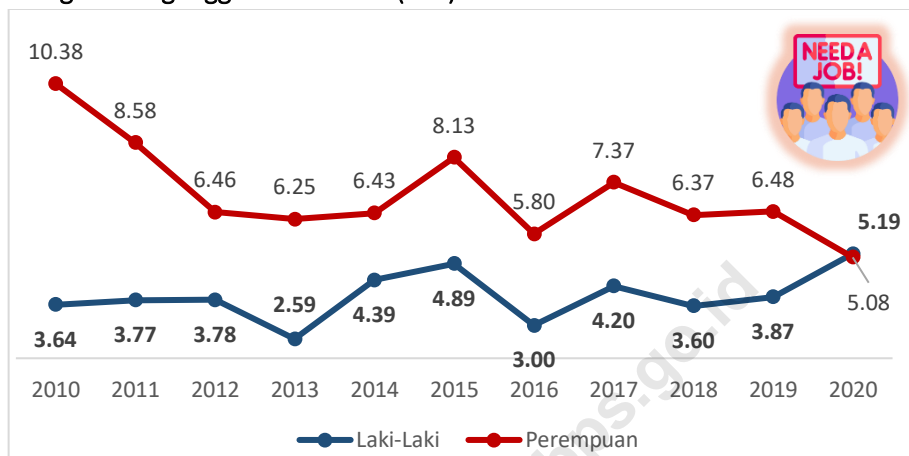
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, data diolah

### Dinamika Ketenagakerjaan

Hak-hak wanita dalam bekerja yang merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap pekerja wanita diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan antara lain perlindungan jam kerja, perlindungan dalam masa haid, perlindungan selama cuti hamil dan melahirkan, pemberian lokasi menyusui, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja perempuan, dan perlindungan upah. Namun kenyataannya di dunia kerja masih ditemukan perlakuan diskriminasi dari mereka yang dominan baik secara struktural maupun kultural. Perlakuan diskriminatif dan ketidaksetaraan tersebut dapat menimbulkan kerugian dan menurunkan kesejahteraan hidup bagi pihak-pihak yang termarginalisasi dan ter subordinasi. Dalam hal ini kaum perempuan yang paling berpotensi mendapatkan perlakuan yang diskriminatif.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Adapun besarnya, terlihat bahwa TPT perempuan selalu berada di atas laki-laki sepanjang periode 2010-2019. Namun tahun 2020 menjadi titik balik, dimana TPT perempuan menjadi lebih kecil dibandingkan laki-laki. Hal ini dimungkinkan mengingat pandemi COVID-19 telah mengakibatkan resesi sehingga banyak usaha terutama informal yang memilih untuk mempekerjakan perempuan dibanding laki-laki dikarenakan besaran upah yang harus dibayarkan jauh lebih rendah.

Gambar 3.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2020 (Tahun)



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, data diolah

Pembedaan upah karena alasan jenis kelamin merupakan tindak subordinasi berbasis gender yang melanggar hak asasi perempuan karena mereka mempunyai kewajiban yang sama dalam pekerjaan. Ketentuan upah selain diatur dalam Undang-undang ketenagakerjaan juga di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak. Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja /buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar

Tabel 3.1 Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja per Bulan Tahun 2010-2020

Tahun	Upah (Juta Rupiah)		Rasio Upah Perempuan Terhadap Laki-laki
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	1,76	1,28	0,73
2011	1,91	1,72	0,90
2012	2,01	1,80	0,90
2013	2,30	1,86	0,81
2014	2,37	1,93	0,81
2015	2,27	2,16	0,95
2016	2,74	2,15	0,78
2017	2,89	2,24	0,78
2018	2,88	2,23	0,77
2019	3,09	2,29	0,74
2020	3,12	2,40	0,77

Sumber : BPS RI, Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2010-2020

Diskriminasi dalam pengupahan tercermin dari rata-rata upah/gaji bersih yang diterima oleh pekerja laki-laki dan perempuan. Terlihat bahwa rata-rata upah/gaji bersih pekerja perempuan selalu lebih rendah bila dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Walaupun setiap tahun rata-rata upah/gaji bersih pekerja perempuan mengalami peningkatan namun kesenjangan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan sejak tahun 2016. Hal ini ditandai dengan turunnya rasio upah pekerja perempuan terhadap upah pekerja laki-laki (Tabel 3.1).

Memperkuat SDM perempuan dan memberdayakan perempuan melalui pendidikan formal dan non formal menjadi salah satu daya tawar perempuan di pasar tenaga kerja. Tanpa pendidikan dan keterampilan, kesenjangan ekonomi sulit dihapuskan. Dengan meningkatkan kompetensi dan keahlian perempuan akan berdampak pada partisipasi dan kontribusi perempuan dalam pembangunan.

### Kesempatan Dalam Bidang Politik

Pelabelan warga “kelas dua” terhadap perempuan dalam ranah publik bukanlah hal yang baru. Walaupun di Indonesia tidak ada catatan sejarah terkait peminggiran perempuan secara formal dari ruang publik namun banyak situasi kultural yang memaksa mereka menjauh darinya. Di bidang politik, walaupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu ternyata tidak berbanding lurus dengan representasi kepentingan politik perempuan.

Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD membawa angin segar terkait tuntutan untuk kesetaraan gender di segala bidang terutama bidang politik yang semakin kuat. Adanya penetapan batas minimum keterwakilan perempuan dalam parlemen sebesar 30 persen seharusnya bisa dimanfaatkan agar kebijakan yang dihasilkan nantinya dapat mengakomodasi aspirasi perempuan. Dibutuhkan calon legislatif yang mempunyai kualitas atau kecakapan dan jiwa pengarusutamaan gender.

Dengan memutuskan masuk ke ruang publik, kaum hawa telah mulai membuka pintu keterkungkungannya dari budaya patriarki. Namun keterwakilan perempuan di DPRD Maluku Utara hasil pemilihan legislatif 2019 hanya sebesar 26,67 persen dari total anggota DPRD yang mencapai 45 orang. Rendahnya angka keterwakilan perempuan disinyalir akibat sedikitnya perempuan yang memutuskan terjun ke dunia politik. Kemandirian finansial yang diduga membatasi perempuan untuk beraktivitas di bidang politik dikarenakan biaya yang dibutuhkan tidaklah murah.







Bab **4**



# Capaian Keberhasilan Pembangunan Gender

*“Achieving gender equality requires the engagement of women  
and men, girls and boys. It is everyone’s responsibility.”*



~ Ban Ki-moon ~







## BAB IV

### Capaian Keberhasilan Pembangunan Gender

#### Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan

Paradigma pembangunan yang ada saat ini berfokus pada pembangunan manusia, akan tetapi hasilnya ternyata secara relatif tidak memberikan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki. Hasil pembangunan memperlihatkan bahwa di hampir semua bidang kehidupan, seperti pendidikan, ke kesehatan, ekonomi, hukum, dan politik, pencapaian yang diraih perempuan lebih tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Padahal kebijakan, program maupun proyek pembangunan tidak bermaksud diskriminatif.

Penyebabnya adalah adanya ketimpangan hubungan gender yang berimplikasi jauh terhadap upaya-upaya pembangunan belum/kurang dicermati oleh para pengambil kebijakan, perencanaan, maupun para pelaksana pembangunan. Hubungan gender yang timpang itu 'menyembunyikan' peran gender yang disandang perempuan, sehingga tidak dikenal dan diaspirasi sebagai kontribusi dalam pembangunan. Pekerjaan yang dilakukan perempuan (diluar sekor formal) misalnya tidak termasuk yang dianalisis, karena di luar definisi formal bekerja. Bahkan seringkali perempuan sendiri justru tidak menganggap hal tersebut sebagai 'bekerja' atau mencari nafkah.

Berbagai program pembangunan yang dirancang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia biasanya ditujukan bagi semua anggota masyarakat. Program ini disebut program umum namun ternyata program tersebut kurang efektif karena mengasumsikan bahwa seluruh anggota masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki mempunyai modal dan kebutuhan yang sama. Pada kenyataannya asumsi semacam ini adalah keliru, sehingga proses pembangunan tidak berjalan efektif seperti yang diharapkan. Apalagi kalau program yang umum tersebut hanya disisipkan pada suatu tahap dalam proses pembangunan, misalnya dalam tahap perencanaan saja, atau diterapkan pada program-program di satu sektor saja, maka hasilnya juga tidak akan efektif.

*Gender mainstreaming* (pengarusutamaan gender) adalah suatu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan, program, proyek, dan kegiatan pembangunan nasional di seluruh bidang dan sektor pembangunan. Tujuan dari pengarusutamaan gender (PUG) adalah mewujudkan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan.

#### Perkembangan Capaian Pembangunan Gender

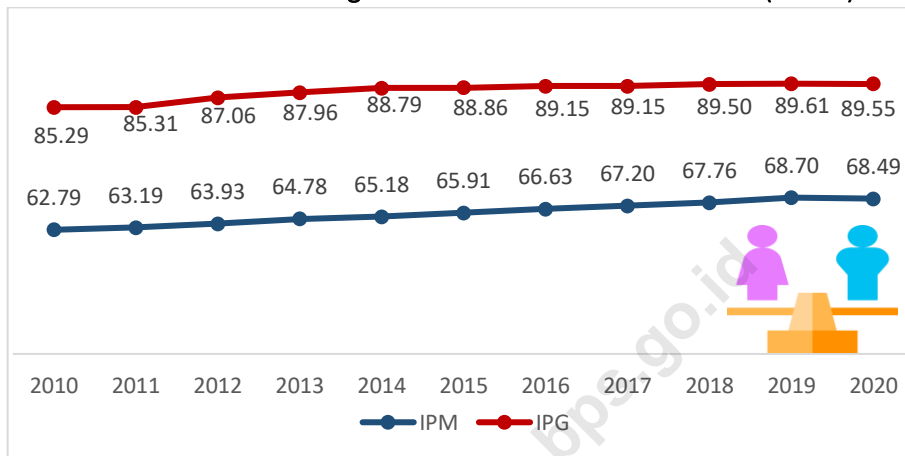
Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), maka Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyampaikan penghargaan sejak tahun 2004 yang disebut "Anugerah Parahita Ekapraya" (APE). Hanya saja Maluku Utara belum berhasil memperoleh penghargaan tersebut hingga saat ini.

Keberhasilan pembangunan gender terlihat dari meningkatnya angka IPG dalam waktu sepuluh tahun terakhir kecuali di tahun 2020 sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun besaran IPG pada tahun

2020 menjadi 89,55 atau menurun 0,06 poin dibandingkan tahun 2019 namun berhasil meningkat 4,26 poin dibandingkan tahun 2010.

Bila dilihat Gambar 4.1 di bawah, dapat diperoleh informasi bahwa peningkatan maupun penurunan IPG terjadi seiring dengan meningkat atau menurunnya angka IPM. Sehingga perbedaan perlakuan terhadap perempuan, cenderung menurun dengan meningkatnya capaian pembangunan manusia, begitu juga sebaliknya. Kondisi inilah yang menjadi bukti bahwa program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan di Maluku Utara belum sepenuhnya berpedoman pada strategi pengarusutamaan gender.

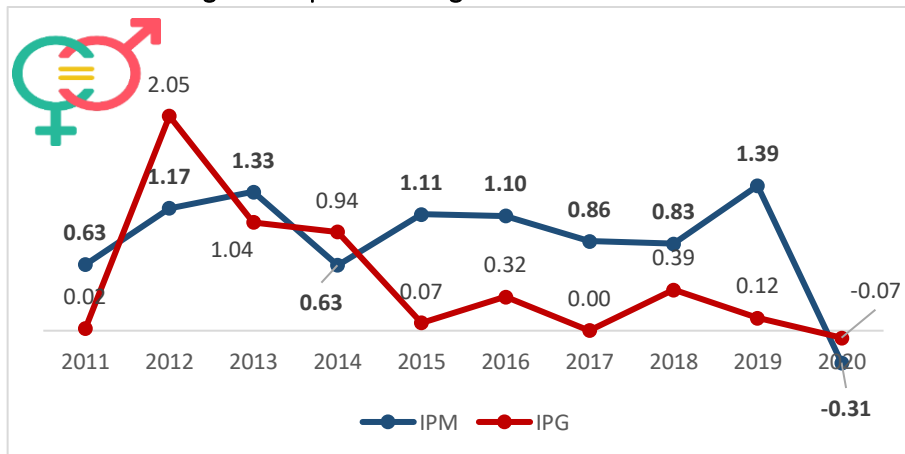
Gambar 4.1 Perkembangan IPG dan IPM Tahun 2010-2020 (Tahun)



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, data diolah

Kesenjangan dalam pencapaian kapabilitas dasar antara laki-laki dan perempuan masih terjadi dengan melihat angka IPG yang masih kurang dari 100. Selain itu bila dilihat kecepatan peningkatan IPG secara umum lebih rendah dari IPM (Gambar 4.2), menandakan bahwa akselerasi dari peningkatan kapabilitas dasar penduduk perempuan berjalan lebih lambat daripada penduduk laki-laki.

Gambar 4.2 Perkembangan Kecepatan Peningkatan IPG dan IPM Tahun 2010-2020 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, data diolah

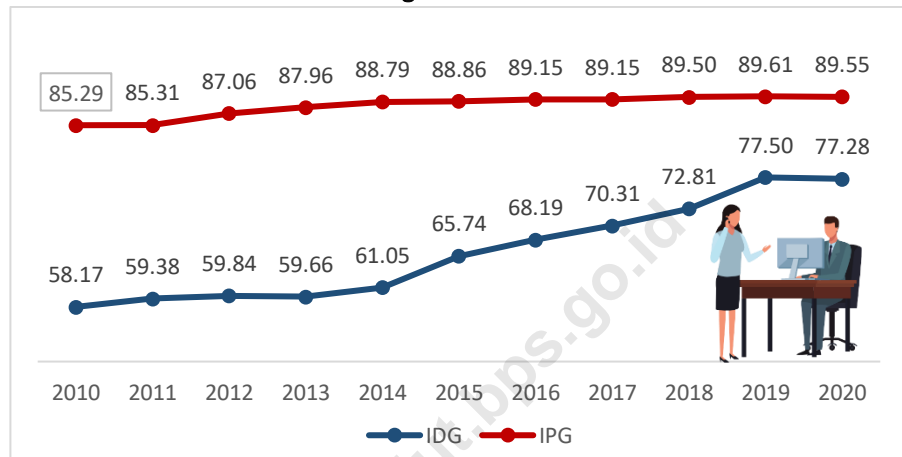
### Pembangunan Gender Belum Sepenuhnya Diikuti Oleh Pemberdayaan Gender

Pembangunan gender, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bertujuan untuk mewujudkan persamaan kualitas pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan. Meski masih belum menyamai laki-laki, kualitas pembangunan perempuan di Maluku Utara selalu menunjukkan

peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang terkait dengan pemberdayaan gender.

Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender di Maluku Utara, digunakan sebuah indeks komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berbeda dengan IPG, IDG lebih fokus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Indikator ini merupakan adopsi dari *Gender Empowerment Measure* (GEM) yang disusun oleh UNDP. IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan.

Gambar 4.3 Perkembangan IPG dan IDG Tahun 2010-2020



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, data diolah

Angka IDG berada dalam rentang nilai 0 sampai dengan 100. Nilai 0, memiliki makna bahwa kaum perempuan tidak memiliki peran dalam kehidupan ekonomi dan politik, atau belum diberdayakan. Sebaliknya nilai 100 diberikan ketika perempuan memiliki peran yang sama dengan laki-laki, atau dengan kata lain perempuan dan laki-laki sama-sama diberdayakan. Bila dilihat Gambar 4.3, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan atau peranan perempuan Maluku Utara dalam kehidupan ekonomi dan politik, masih jauh dari kondisi ideal. Namun demikian, peranannya secara umum telah meningkat, seiring dengan bertambahnya kapabilitas dasar mereka.

### Capaian Pembangunan Gender Kabupaten/Kota

Semua kabupaten/kota di Maluku Utara hendaknya memiliki semangat yang sama dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender. Hanya saja, capaian pembangunan gendernya ternyata masih belum merata. Bila dilihat Gambar 4.4, baru tiga kabupaten/kota dengan nilai IPG di atas 90, sedangkan satu kabupaten/kota nilai IPG di bawah 70. Informasi ini merefleksikan persoalan yang cukup serius dalam pembangunan gender di sejumlah kabupaten/kota di Maluku Utara.

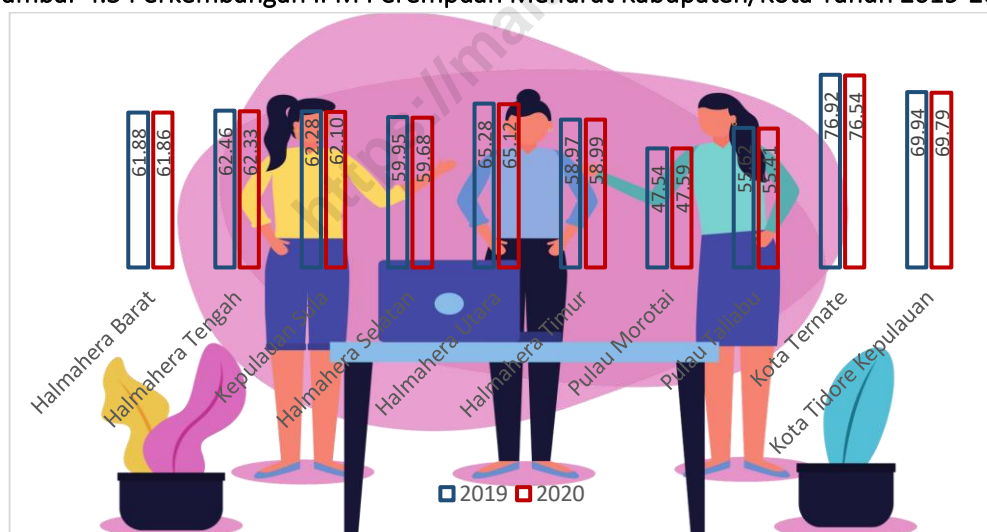
Gambar 4.4 Perkembangan IPG Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, data diolah

Dari sisi capaian IPG pada tahun 2020 semua kabupaten/kota di Maluku Utara mengalami penurunan angka IPG kecuali Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan. Meskipun demikian, penurunannya itu terlihat tidak begitu besar. Penurunan ini terjadi seiring dengan menurunnya angka IPM Perempuan (Gambar 4.5), kecuali Kabupaten Pulau Morotai yang mengalami kenaikan IPM Perempuan namun kenaikannya lebih rendah bila dibandingkan kenaikan IPM laki-laki.

Gambar 4.5 Perkembangan IPM Perempuan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, data diolah

Pembangunan manusia sejatinya harus berjalan seiring dengan pembangunan pada penduduk perempuan dan laki-laki secara adil dan setara. Hal penting yang perlu diperhatikan dari capaian nilai IPG adalah nilai IPG yang tinggi bisa diperoleh dari daerah dengan IPM Perempuan dan IPM Laki-laki yang “sama-sama tinggi” atau “sama-sama rendah”. Sehingga dalam menganalisis IPG, nilai IPM secara terpisah jenis kelamin harus tetap dicermati.

Gambar 4.6 Perkembangan IDG Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, data diolah

Terkait pemberdayaan perempuan, pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Bahkan di tahun 2020, peranan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik di sebagian besar kabupaten/kota justru mengalami penurunan. Penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Sula. Sebaliknya di Kabupaten Halmahera Barat, kaum perempuannya pada tahun 2020 menikmati kenaikan peran dalam kehidupan ekonomi dan politik.

### Tipologi Klassen IPM, IPG dan IDG Kabupaten/Kota

Hubungan searah yang terjadi antara angka IPM dan IPG menghasilkan interpretasi bahwa daerah dengan IPM tinggi akan memiliki angka IPG yang tinggi pula, begitupun sebaliknya. Namun demikian, hal ini tidak berlaku bila antara laki-laki dan perempuan terjadi perbedaan perlakuan yang cukup besar dalam peningkatan kapabilitas atau pembangunan manusia.

Di sisi lain, tiadanya perbedaan perlakuan dalam pembangunan manusia, akan meningkatkan kapabilitas perempuan, hingga mampu berdiri sejajar bersama laki-laki. Kondisi ini dapat meningkatkan peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dengan demikian, wilayah dengan IPG tinggi seharusnya akan memiliki angka IDG yang tinggi pula.

Untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya hubungan antara angka IPM, IPG dan IDG di Maluku Utara, setidaknya diperlukan Analisis Tipologi Klassen. Analisis ini dilakukan dengan membagi kabupaten/kota sesuai dengan posisi capaian IPM, IPG dan IDG, yang dilihat dari rata-rata Maluku Utara. Dalam Tipologi Klassen, kabupaten/kota dikelompokkan dalam empat kuadran sebagai berikut :

Kuadran I : Kabupaten/kota dengan IPM (IDG) dan IPG di atas angka Maluku Utara

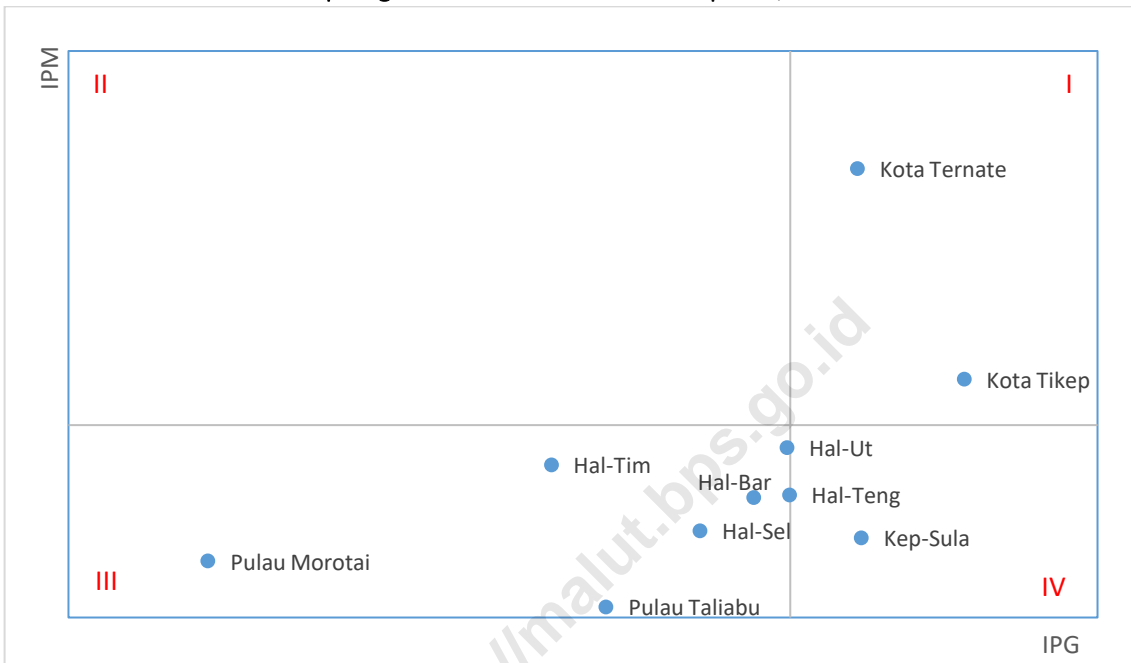
Kuadran II : Kabupaten/kota dengan IPM (IDG) dan IPG di atas angka Maluku Utara, tetapi IPG nya di bawah angka Maluku Utara

Kuadran III : Kabupaten/kota dengan IPM (IDG) dan IPG di bawah angka Maluku Utara

Kuadran IV : Kabupaten/kota dengan IPM (IDG) di bawah angka Maluku Utara, tetapi IPG nya di atas Maluku Utara

Berdasarkan Tipologi Klasen yang disajikan pada Gambar 4.7, secara umum memang terlihat ada hubungan yang searah atau positif antara IPM dengan IPG. Dalam hal ini, kabupaten/kota dengan angka IPG tinggi (di atas IPG Maluku Utara) mempunyai angka IPM yang tinggi pula (di atas IPM Maluku Utara), demikian pula sebaliknya. Hanya saja terdapat anomaly untuk Kabupaten Kepulauan Sula yang mempunyai angka IPG melebihi angka IPG Maluku Utara, namun IPM nya justru berada lebih rendah dari angka IPM Maluku Utara (kuadran IV).

Gambar 4.7 Tipologi Klasen IPM dan IPG Kabupaten/Kota Tahun 2020

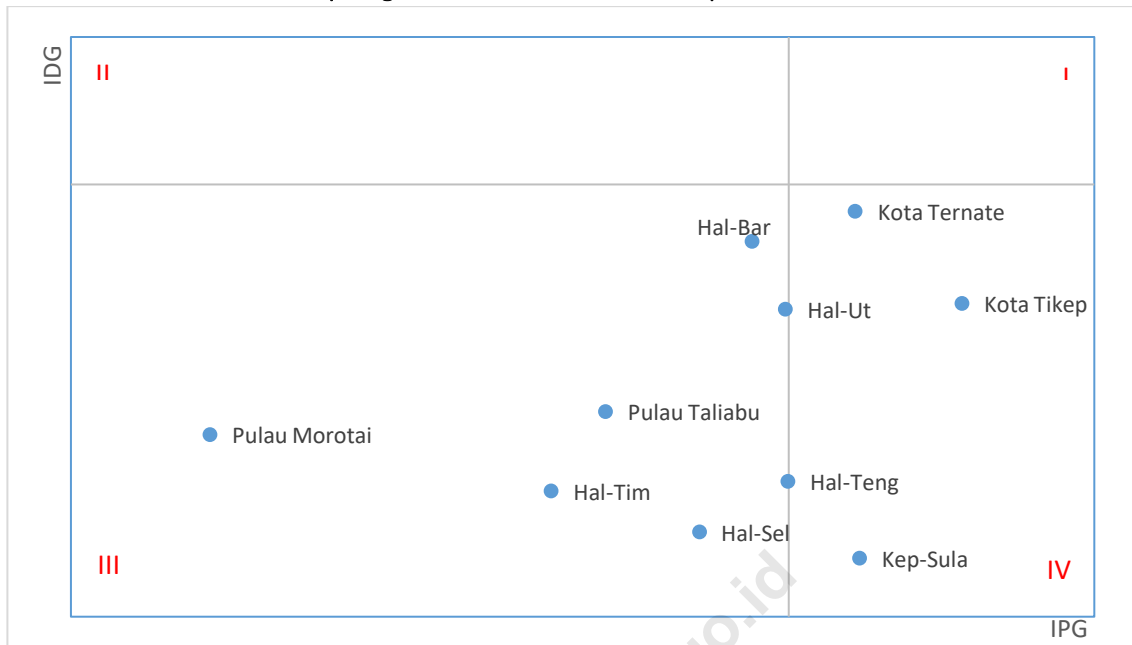


Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, data diolah

Struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula didominasi oleh lapangan usaha pertanian mencapai 40,20 persen. Selanjutnya peranan lapangan usaha perdagangan, juga cukup besar yaitu mencapai 14,64 persen, sehingga menduduki peringkat ketiga. Kedua jenis usaha ini diketahui lebih ramah terhadap perempuan sehingga porsi pendapatan antara laki-laki-dan perempuan menjadi tidak terlalu timpang. Imbasnya, IPG Kabupaten Sula menjadi lebih tinggi dari Maluku Utara.

Adapun pada Kuadran I, terlihat 2 kota yaitu, Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan yang capaian IPM dan IPG nya di atas angka Maluku Utara. Pada kuadran ini, tigginya capaian pembangunan manusia yang telah diraih mampu mendorong terciptanya kesetaraan gender. Sebaliknya pada Kuadran III, yang ditempati 7 kabupaten dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara, dengan IPM dan IPG yang lebih rendah dari Maluku Utara. Dalam posisi ini, khususnya Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Pulau Taliabu akan sangat sulit bagi kaum perempuannya untuk memperoleh kesetaraan gender ketika kualitas hidup masyarakatnya masih tergolong rendah.

Gambar 4.8 Tipologi Klassen IDG dan IPG Kabupaten/Kota Tahun 2020



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, data diolah

Sementara itu berdasarkan Tipologi Klassen yang disajikan pada Gambar 4.8, terlihat bahwa kabupaten/kota dengan angka IPG di bawah Maluku Utara, juga memiliki angka IDG di bawah Maluku Utara. Adapun yang mempunyai IPG di atas Maluku Utara, ternyata semuanya memiliki angka IDG di bawah Maluku Utara pula. Dengan Demikian, dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara IPG dan IDG untuk level kabupaten/kota di Maluku Utara.

### Posisi IPG dan IDG Maluku Utara di Tengah Provinsi Lainnya

Secara umum sepertinya masih ada permasalahan dalam implementasi strategi pengarusutamaan gender (PUG) di Maluku Utara. Kondisi ini dapat diketahui dengan melihat peringkat Maluku Utara secara Nasional untuk IPM, IPM Perempuan dan IPG. Tampak bahwa Maluku Utara di tahun 2020 tidak masuk peringkat 10 besar untuk IPM, IPM Perempuan dan IPG. Adapun IPM dan IPM Perempuan Maluku Utara berada pada urutan ke dua puluh delapan dan ke dua puluh enam di Indonesia (Tabel 4.1).

Rendahnya peringkat IPG Maluku Utara (peringkat 21), pada saat peringkat IPM dan IPM Perempuan sangat rendah menggambarkan kesulitan yang dihadapi kaum perempuan di Maluku Utara untuk memperoleh kesetaraan gender pada saat kualitas hidup masyarakatnya masih tergolong rendah. Bila ditelusuri penyebabnya, ketidakseimbangan tersebut terjadi pada komponen pengeluaran perkapita yang disesuaikan, komponen rata-rata lama sekolah dan komponen harapan lama sekolah. Pada ketiga komponen ini, rasio capaian perempuan terhadap laki-laki masing-masing hanya mencapai 0,56, 0,91 dan 0,99. Akibatnya, ketiga rasio komponen tersebut menempati urutan 19, 22 dan 28 dari 34 provinsi di Indonesia.

Tabel 4.1 Provinsi Berperingkat 10 Besar IPM, IPM Perempuan, IPG, dan IDG Tahun 2020

Peringkat	IPM	IPM Perempuan	IPG	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DKI Jakarta	DKI Jakarta	DI Yogyakarta	Kalimantan Tengah
2	DI Yogyakarta	DI Yogyakarta	DKI Jakarta	Sulawesi Utara
3	Kalimantan Timur	Kepulauan Riau	Sulawesi Utara	Maluku Utara
4	Kepulauan Riau	Bali	Sumatera Barat	Sulawesi Selatan
5	Bali	Sulawesi Utara	Bali	Sulawesi Tengah
6	Sulawesi Utara	Sumatera Barat	Kepulauan Riau	Maluku
7	Riau	Sulawesi Selatan	Maluku	DKI Jakarta
8	Banten	Banten	Sulawesi Selatan	DI Yogyakarta
9	Sumatera Barat	Aceh	Nusa Tenggara Timur	Sumatera Selatan
10	Jawa Barat	Jawa Tengah	Sumatera Selatan	Nusa Tenggara Timur

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, data diolah

Sementara itu capaian IDG Maluku Utara berhasil menempati peringkat ketiga di Indonesia pada tahun 2020. Tingginya capaian IDG disebabkan oleh tingginya komponen persentase keterlibatan perempuan di parlemen dan komponen sumbangan pendapatan perempuan. Keduanya, masing-masing berada di peringkat 6 dan 7, dengan besaran mencapai 26,67 persen dan 36,75 persen.



# Bab 5

## Kesimpulan

*“Gender equality is more than a goal in itself. It is a precondition for meeting the challenge of reducing poverty, promoting sustainable development and building good governance.”*



~ Kofi Annan ~



## Bab V

### Kesimpulan

- ❖ Kondisi kesehatan perempuan Maluku Utara lebih baik dari laki-laki ditandai dengan lebih besarnya umur harapan hidup (UHH) perempuan. Lama hidup perempuan sendiri, secara rata-rata lebih panjang empat tahun dibandingkan laki-laki.
- ❖ Kualitas pendidikan perempuan Maluku Utara lebih rendah daripada laki-laki. Kondisi ini ditandai oleh rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk perempuan usia 25 tahun ke atas yang lebih singkat dibandingkan laki-laki. Selain itu, persentase penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang berijazah SMA/Sederajat dan Universitas juga masih di bawah laki-laki.
- ❖ Dunia pendidikan Maluku Utara akan semakin terbuka bagi kaum perempuan di masa mendatang. Hal ini setidaknya terlihat dari angka partisipasi sekolah (APS) kelompok usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun penduduk perempuan, yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selain itu, harapan lama sekolah (HLS) penduduk perempuan usia 7 tahun terus meningkat, namun tetap berada di bawah HLS laki-laki.
- ❖ Diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pekerjaan sepertinya mulai berkurang, setidaknya di tahun 2020 menjadi titik balik, dimana TPT perempuan menjadi lebih kecil dibandingkan laki-laki.
- ❖ Setelah memasuki dunia kerja masih ditemui diskriminasi dalam hal pengupahan dimana rata-rata upah pekerja perempuan yang selalu lebih kecil dibandingkan pekerja laki-laki. Selain itu, kesenjangan upah antara pekerja perempuan dan laki-laki juga mengalami peningkatan, ditandai oleh turunnya rasio upah pekerja perempuan terhadap upah pekerja laki-laki.
- ❖ Keterwakilan perempuan Maluku Utara di parlemen hasil pemilihan legislatif 2019 hanya sebesar 26,67 persen dari total anggota DPRD yang mencapai 45 orang. Persentase ini masih di bawah batas minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam parlemen sesuai amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 2012.
- ❖ Maluku Utara, hingga saat ini belum berhasil memperoleh “Anugerah Parahita Ekapraya” (APE) dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).
- ❖ IPG Maluku Utara meningkat seiring dengan meningkatnya IPM. Berarti, perbedaan perlakuan terhadap perempuan menurun seiring dengan meningkatnya capaian pembangunan manusia. Dengan kata lain, pengakuan terhadap peran perempuan semakin bertambah seiring dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- ❖ Masih ada kesenjangan dalam pencapaian kapabilitas dasar antara perempuan dan laki-laki di Maluku Utara, terlihat dari angka IPG yang masih kurang dari 100. Selain itu peningkatan kapabilitas dasar perempuan juga berjalan lebih lambat daripada laki-laki.
- ❖ Pada tahun 2020, hampir seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara mengalami penurunan angka IPG kecuali Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan.

Penurunan ini terjadi seiring dengan menurunnya angka IPM Perempuan kecuali Kabupaten Pulau Morotai yang mengalami kenaikan IPM Perempuan namun kenaikannya lebih rendah bila dibandingkan kenaikan IPM laki-laki.

- ❖ Peningkatan kualitas hidup akan menghasilkan kesetaraan gender yang menempatkan perempuan berdiri sejajar dengan laki-laki. Kesejajaran inilah yang diharapkan dapat menghapus berbagai budaya yang menghambat perempuan dalam memberdayakan diri. Sayangnya, pemberdayaan atau peranan perempuan Maluku Utara dalam kehidupan ekonomi dan politik masih jauh dari kondisi ideal. Namun demikian, peranannya secara umum telah meningkat, seiring dengan bertambahnya kapabilitas dasar mereka walaupun di tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
- ❖ Terkait pemberdayaan perempuan, pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Bahkan di tahun 2020, peranan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik di sebagian besar kabupaten/kota justru mengalami penurunan.

<https://malut.bps.go.id>

## Daftar Pustaka

- Afandi, Agus. 2019. *Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender*. LENTERA: *Journal of Gender and Children Studies Volume 1 Issue 1*, Desember 2019 p.1-18
- BPS. 2020. *Analisis Isu Terkini 2020*. BPS: Jakarta
- BPS. 2019. *Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia Agustus 2019*. BPS: Jakarta
- BPS. 2020. *Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia Agustus 2020*. BPS: Jakarta
- BPS Provinsi Banten. 2020. *Indeks Pembangunan Gender Provinsi Banten 2019*. BPS Provinsi Banten: Serang
- BPS Provinsi Maluku Utara. 2020. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara 2020*. BPS Provinsi Maluku Utara: Ternate
- BPS Provinsi Maluku Utara. 2021. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara 2020*. BPS Provinsi Maluku Utara: Ternate
- Djoharwinarli, Sri. 2012. *Dilema Kesetaraan Gender : Refleksi dan Respons Praktis*. Center for Politics and Government Fisipol UGM: Yogyakarta
- Kemen PPPA. 2019. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019*. Kemen PPPA: Jakarta
- Kemen PPPA. 2020. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*. Kemen PPPA: Jakarta
- Kemitraan Universitas Masyarakat (KUM) UIN Alauddin Makassar. 2016. *Buku Saku Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya*. UIN Alauddin : Makassar
- Lemaire, Jean. 2002. *Why do Females Live Longer Than Males?*. North American Actuarial Journal, 6 (4), 21-37. <http://dx.doi.org/10.1080/10920277.2002.10596061>
- Mahfiana, Layyin. 2015. *Perempuan Dan Diskriminasi (Studi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan)*. Jurnal Al-'Adl, Volume 8, No.2 Tahun 2015
- Muhammad, Hamid & Sardjunani, Nina. 2010. *Menjamin Keberhasilan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Melalui Penganggaran Responsif Gender*. Jurnal AKRAB!, Volume 1 Tahun 2010
- Nasir, Lilianti. 2017. *Persamaan Hak : Partisipasi Wanita Dalam Pendidikan*. Didaktis : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, Volume 17, No.1 Tahun 2017
- Rachminawati, Nan. 2001. *Isu Kesetaraan Laki-laki Dan Perempuan (Bias Gender)*. Mimbar, No. 3 Th.XVII 2001
- Rosyidah & Dwisetiyani. (2007). *Gender and Productive Healthy Study: Folicy Brief No. 10*. Australian Demographic and Social Research Institute: The Australian National University.
- Syafe'i, Imam. 2015. *Subordinasi Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga*. Analisis : Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 1 Tahun 2015

Syamsiyah, Dailatus. 2015. *Perempuan dalam Tantangan Pendidikan Global: Kontribusi Kaum Perempuan dalam Mewujudkan Millenium Development Goals*. PALASTREN, Volume 8, No.2 Tahun 2015

Uswatun, Defi. 2016. *Kekerasan Dan Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Pandangan Hukum*. HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak, Volume 12, p.109-116

Zusmelia. 2012. *Analisis Ketimpangan Gender Dalam Proses Pembangunan*. Jurnal Pelangi, Volume 5 No.1 2012

#### **Sumber Media Daring**

KOTAKU. 2014. *Apakah "Gender" Hanya Pemberdayaan Perempuan?*. Retrieved from: <http://kotaku.pu.go.id:8081/wartadetil.asp?mid=6270&catid=2&> diakses pada 8 Maret 2019.

KOTAKU. 2014. *Kapan Perbedaan Gender menjadi Masalah*. Retrieved from: <http://kotaku.pu.go.id:8081/wartadetil.asp?mid=6459&catid=2&> diakses pada 9 Maret 2019.

KOTAKU. 2014. *Kesetaraan Gender VS Keadilan Gender*. Retrieved from: <http://kotaku.pu.go.id:8081/wartadetil.asp?mid=6283&catid=2&> diakses pada 10 Maret 2019.

## Lampiran

Lampiran 1. IPG Menurut Komponen Tahun 2010-2020

Tahun	UHH (Tahun)		HLS (Tahun)	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	64,80	68,69	11,27	11,79
2011	64,97	68,88	11,72	11,88
2012	65,12	69,08	12,18	12,22
2013	65,31	69,28	12,40	12,57
2014	65,41	69,38	12,52	12,92
2015	65,51	69,48	13,09	13,11
2016	65,53	69,50	13,51	13,40
2017	65,56	69,53	13,69	13,43
2018	65,82	69,79	13,70	13,60
2019	66,25	70,17	13,71	13,63
2020	66,43	70,32	13,72	13,67

Lampiran 1. IPG Menurut Komponen Tahun 2010-2020

Lanjutan

Tahun	RLS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah)	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	8,51	7,17	9.543	4.539
2011	8,58	7,23	10.137	4.835
2012	8,57	7,50	10.475	5.363
2013	8,80	7,73	10.813	5.712
2014	8,90	7,76	11.162	6.065
2015	8,91	7,80	11.508	6.397
2016	8,99	8,06	11.632	6.506
2017	9,05	8,17	11.885	6.655
2018	9,15	8,28	12.178	6.833
2019	9,44	8,55	12.662	7.094
2020	9,47	8,61	12.233	6.850



Lampiran 2. IPG Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010- 2020

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Maluku Utara	85,29	85,31	87,06	87,96	88,79	88,86
Halmahera Barat	84,07	85,43	86,81	88,13	88,71	89,23
Halmahera Tengah	83,83	84,68	85,22	87,47	89,30	89,44
Kepulauan Sula	84,27	85,71	87,32	89,66	91,33	91,83
Halmahera Selatan	83,89	84,35	84,70	85,10	85,15	85,37
Halmahera Utara	86,34	87,14	87,54	87,85	88,70	88,71
Halmahera Timur	69,94	72,37	75,98	78,15	80,66	80,77
Pulau Morotai	...	63,24	63,73	63,75	63,94	67,29
Pulau Taliabu	...	...	...	80,77	81,48	81,83
Kota Ternate	89,91	90,66	90,89	90,91	91,00	91,36
Kota Tidore Kepulauan	85,98	90,80	91,88	92,87	94,34	95,19

## Lampiran 2. IPG Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2020

Lanjutan

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Maluku Utara	89,15	89,15	89,50	89,61	89,55
Halmahera Barat	88,77	88,20	87,79	88,20	88,30
Halmahera Tengah	89,53	89,52	89,34	89,61	89,53
Kepulauan Sula	91,80	92,13	92,14	92,14	91,97
Halmahera Selatan	85,90	85,83	86,41	86,60	86,49
Halmahera Utara	89,31	89,14	88,81	89,35	89,44
Halmahera Timur	81,20	81,29	81,30	81,41	81,43
Pulau Morotai	68,25	68,57	69,40	69,86	69,75
Pulau Taliabu	81,94	81,87	82,82	83,58	83,29
Kota Ternate	91,55	91,89	91,92	92,10	91,83
Kota Tidore Kepulauan	95,71	95,33	95,12	95,13	95,47

Lampiran 3. IPG Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020

Kabupaten/Kota	UHH (Tahun)			
	Laki-Laki		Perempuan	
	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Maluku Utara	66,25	66,43	70,17	70,32
Halmahera Barat	64,13	64,28	68,02	68,14
Halmahera Tengah	61,69	61,99	65,49	65,75
Kepulauan Sula	61,24	61,37	65,02	65,14
Halmahera Selatan	63,77	63,90	67,63	67,73
Halmahera Utara	67,44	67,55	71,38	71,48
Halmahera Timur	66,61	66,89	70,57	70,80
Pulau Morotai	64,98	65,18	68,90	69,09
Pulau Taliabu	60,04	60,20	63,76	63,92
Kota Ternate	68,84	68,99	72,75	72,87
Kota Tidore Kepulauan	67,20	67,36	71,14	71,25

## Lampiran 3. IPG Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020

Lanjutan

Kabupaten/Kota	HLS (Tahun)			
	Laki-Laki		Perempuan	
	2019	2020	2019	2020
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Maluku Utara	13,71	13,72	13,63	13,67
Halmahera Barat	12,96	12,97	13,09	13,27
Halmahera Tengah	13,11	13,12	12,69	12,92
Kepulauan Sula	12,95	12,96	12,72	12,73
Halmahera Selatan	12,80	12,81	12,47	12,55
Halmahera Utara	13,68	13,69	13,22	13,37
Halmahera Timur	13,06	13,07	12,61	12,62
Pulau Morotai	11,85	12,20	12,43	12,77
Pulau Taliabu	12,16	12,32	12,58	12,59
Kota Ternate	15,61	15,62	15,86	15,87
Kota Tidore Kepulauan	14,15	14,16	14,24	14,49

Lampiran 3. IPG Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020

Lanjutan

Kabupaten/Kota	RLS (Tahun)			
	Laki-Laki		Perempuan	
	2019	2020	2019	2020
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
Maluku Utara	9,44	9,47	8,55	8,61
Halmahera Barat	8,86	9,05	7,83	8,09
Halmahera Tengah	9,30	9,51	8,58	8,70
Kepulauan Sula	9,13	9,35	8,44	8,61
Halmahera Selatan	8,49	8,50	7,34	7,35
Halmahera Utara	8,96	9,09	7,90	8,00
Halmahera Timur	8,65	8,78	7,61	7,94
Pulau Morotai	7,65	7,85	6,53	6,91
Pulau Taliabu	7,86	8,03	7,07	7,30
Kota Ternate	12,02	12,15	11,26	11,27
Kota Tidore Kepulauan	10,28	10,29	9,42	9,56

## Lampiran 3. IPG Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020

Lanjutan

Kabupaten/Kota	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah)			
	Laki-Laki		Perempuan	
	2019	2020	2019	2020
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)
Maluku Utara	12.662	12.233	7.094	6.850
Halimahera Barat	11.152	10.696	5.932	5.676
Halimahera Tengah	11.308	10.745	6.656	6.312
Kepulauan Sula	9.664	9.294	6.762	6.501
Halimahera Selatan	10.985	10.632	5.617	5.428
Halimahera Utara	11.650	11.111	6.873	6.599
Halimahera Timur	12.632	12.234	4.526	4.378
Pulau Morotai	11.291	10.665	2.417	2.336
Pulau Taliabu	11.764	11.162	4.588	4.396
Kota Ternate	18.184	17.449	10.683	10.246
Kota Tidore Kepulauan	10.170	9.682	8.294	7.881

Lampiran 3. IPG Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020

Lanjutan

Kabupaten/Kota	IPM			
	Laki-Laki		Perempuan	
	2019	2020	2019	2020
(1)	(18)	(19)	(20)	(21)
Maluku Utara	73,89	73,69	66,21	65,99
Halmahera Barat	70,16	70,06	61,88	61,86
Halmahera Tengah	69,70	69,62	62,46	62,33
Kepulauan Sula	67,59	67,52	62,28	62,10
Halmahera Selatan	69,23	69,00	59,95	59,68
Halmahera Utara	73,06	72,81	65,28	65,12
Halmahera Timur	72,44	72,44	58,97	58,99
Pulau Morotai	68,05	68,23	47,54	47,59
Pulau Taliabu	66,55	66,53	55,62	55,41
Kota Ternate	83,52	83,35	76,92	76,54
Kota Tidore Kepulauan	73,52	73,10	69,94	69,79

## Lampiran 3. IPG Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020

Lanjutan

Kabupaten/Kota	IPG	
	2019	2020
(1)	(22)	(23)
Maluku Utara	89,61	89,55
Halmahera Barat	88,20	88,30
Halmahera Tengah	89,61	89,53
Kepulauan Sula	92,14	91,97
Halmahera Selatan	86,60	86,49
Halmahera Utara	89,35	89,44
Halmahera Timur	81,41	81,43
Pulau Morotai	69,86	69,75
Pulau Taliabu	83,58	83,29
Kota Ternate	92,10	91,83
Kota Tidore Kepulauan	95,13	95,47



Lampiran 4. IDG Menurut Komponen Tahun 2010-2020

Tahun	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (Persen)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	8,89	46,94	34,21	58,17
2011	8,89	46,27	34,21	59,38
2012	8,89	47,85	35,36	59,84
2013	8,89	43,24	35,54	59,66
2014	9,09	49,28	35,73	61,05
2015	13,89	44,57	36,32	65,74
2016	16,28	45,05	36,44	68,19
2017	17,78	47,54	36,45	70,31
2018	20,45	47,98	36,46	72,81
2019	26,67	46,63	46,63	77,50
2020	26,67	46,84	46,84	77,28

Lampiran 5. IDG Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2020

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Maluku Utara	58,17	59,38	59,84	59,66	61,05	65,74
Halmahera Barat	45,20	64,50	62,80	64,43	65,29	64,32
Halmahera Tengah	55,04	65,41	65,66	65,99	55,06	57,18
Kepulauan Sula	46,90	47,79	48,33	48,42	40,32	43,68
Halmahera Selatan	35,36	40,20	40,31	45,54	38,01	38,20
Halmahera Utara	62,30	63,97	64,09	63,99	62,05	65,65
Halmahera Timur	39,66	40,64	41,56	42,04	49,36	49,49
Pulau Morotai	38,91	58,72	53,16	57,24	52,42	54,53
Pulau Taliabu	...	...	...	...	43,55	49,16
Kota Ternate	66,23	67,94	67,91	67,15	71,44	70,48
Kota Tidore Kepulauan	57,16	58,96	58,66	59,58	57,18	62,01

## Lampiran 5. IDG Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2020

Lanjutan

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Maluku Utara	68,19	70,31	72,81	77,50	77,28
Halmahera Barat	...	69,15	66,01	66,22	72,36
Halmahera Tengah	...	51,79	51,42	52,20	51,69
Kepulauan Sula	...	48,59	49,51	49,87	45,05
Halmahera Selatan	...	38,52	38,54	47,30	47,29
Halmahera Utara	...	66,33	66,56	66,30	66,53
Halmahera Timur	...	49,53	50,23	50,74	50,84
Pulau Morotai	...	55,45	55,40	55,77	55,71
Pulau Taliabu	...	50,73	53,90	56,73	57,69
Kota Ternate	...	70,03	71,57	74,90	74,96
Kota Tidore Kepulauan	...	66,48	67,02	67,52	67,01

Lampiran 6. IDG Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020

Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)		Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (Persen)	
	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Maluku Utara	26,67	26,67	46,63	46,84
Halmahera Barat	16,00	24,00	51,66	50,55
Halmahera Tengah	5,00	5,00	51,52	47,08
Kepulauan Sula	4,00	0,00	55,52	47,57
Halmahera Selatan	6,67	6,67	47,68	50,19
Halmahera Utara	20,00	20,00	43,91	46,78
Halmahera Timur	5,00	5,00	46,16	43,93
Pulau Morotai	10,00	10,00	45,14	49,73
Pulau Taliabu	25,00	25,00	61,31	57,65
Kota Ternate	20,00	20,00	41,11	43,65
Kota Tidore Kepulauan	16,00	16,00	47,50	48,80

Lampiran 6. IDG Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020

Lanjutan

Kabupaten/Kota	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)		IDG	
	2019	2020	2019	2020
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Maluku Utara	46,63	46,84	77,50	77,28
Halmahera Barat	51,66	50,55	66,22	72,36
Halmahera Tengah	51,52	47,08	52,20	51,69
Kepulauan Sula	55,52	47,57	49,87	45,05
Halmahera Selatan	47,68	50,19	47,30	47,29
Halmahera Utara	43,91	46,78	66,30	66,53
Halmahera Timur	46,16	43,93	50,74	50,84
Pulau Morotai	45,14	49,73	55,77	55,71
Pulau Taliabu	61,31	57,65	56,73	57,69
Kota Ternate	41,11	43,65	74,90	74,96
Kota Tidore Kepulauan	47,50	48,80	67,52	67,01

Lampiran 7. IPG Provinsi se-Indonesia Menurut Komponen Tahun 2020

Provinsi	UHH (Tahun)		HLS (Tahun)	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ACEH	68,04	71,91	14,25	14,48
SUMATERA UTARA	67,22	71,08	13,13	13,41
SUMATERA BARAT	67,59	71,45	13,69	14,41
RIAU	69,75	73,55	13,19	13,41
JAMBI	69,27	73,07	12,94	13,17
SUMATERA SELATAN	68,00	71,86	12,40	12,62
BENGKULU	67,47	71,27	13,56	14,00
LAMPUNG	68,78	72,61	12,54	12,88
KEP. BANGKA BELITUNG	68,77	72,59	11,97	12,14
KEPULAUAN RIAU	68,08	71,90	12,84	12,97
DKI JAKARTA	71,10	74,80	13,09	12,94
JAWA BARAT	71,30	75,00	12,50	12,56
JAWA TENGAH	72,51	76,30	12,70	12,79
D I YOGYAKARTA	73,22	76,83	15,59	15,63
JAWA TIMUR	69,42	73,27	13,24	13,19
BANTEN	68,08	71,93	12,89	12,99
BALI	70,28	74,03	13,48	13,23
NUSA TENGGARA BARAT	64,63	68,39	13,90	13,61
NUSA TENGGARA TIMUR	65,15	68,96	13,08	13,38

## Lampiran 7. IPG Provinsi se-Indonesia Menurut Komponen Tahun 2020

Lanjutan

Provinsi	UHH (Tahun)		HLS (Tahun)	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KALIMANTAN BARAT	68,80	72,67	12,57	12,89
KALIMANTAN TENGAH	67,84	71,66	12,67	12,66
KALIMANTAN SELATAN	66,76	70,62	12,71	12,67
KALIMANTAN TIMUR	72,54	76,21	13,71	13,87
KALIMANTAN UTARA	70,63	74,44	12,93	13,25
SULAWESI UTARA	69,82	73,67	12,76	13,07
SULAWESI TENGAH	66,77	70,72	13,07	13,51
SULAWESI SELATAN	68,68	72,56	13,36	13,74
SULAWESI TENGGARA	69,31	73,37	13,63	13,71
GORONTALO	66,14	70,09	12,80	13,55
SULAWESI BARAT	63,20	67,02	12,73	12,99
MALUKU	64,12	67,93	13,82	14,28
MALUKU UTARA	66,43	70,32	13,72	13,67
PAPUA BARAT	64,20	67,90	13,47	12,64
PAPUA	64,02	67,65	11,30	10,77
INDONESIA	69,59	73,46	12,93	13,04

## Lampiran 7. IPG Provinsi se-Indonesia Menurut Komponen Tahun 2020

Lanjutan

Provinsi	RLS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah)	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
ACEH	9,54	9,13	13.351	8.103
SUMATERA UTARA	9,82	9,28	15.058	8.176
SUMATERA BARAT	9,10	8,89	15.031	9.707
RIAU	9,40	8,87	15.935	7.213
JAMBI	8,91	8,17	15.498	7.366
SUMATERA SELATAN	8,57	7,90	14.748	9.289
BENGKULU	9,18	8,50	14.510	8.159
LAMPUNG	8,36	7,73	14.268	7.720
KEP. BANGKA BELITUNG	8,41	7,67	19.075	8.987
KEPULAUAN RIAU	10,25	9,98	20.222	12.462
DKI JAKARTA	11,50	10,76	22.614	16.742
JAWA BARAT	8,97	8,11	15.275	7.937
JAWA TENGAH	8,16	7,24	15.031	9.724
D I YOGYAKARTA	9,96	9,16	17.050	13.000
JAWA TIMUR	8,30	7,30	16.707	9.976
BANTEN	9,33	8,45	17.027	10.309
BALI	9,68	8,21	16.940	13.465
NUSA TENGGARA BARAT	8,08	6,64	14.182	9.075
NUSA TENGGARA TIMUR	8,01	7,28	10.489	7.192



## Lampiran 7. IPG Provinsi se-Indonesia Menurut Komponen Tahun 2020

Lanjutan

Provinsi	RLS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah)	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
KALIMANTAN BARAT	7,88	6,84	13.314	6.134
KALIMANTAN TENGAH	8,89	8,25	16.108	8.000
KALIMANTAN SELATAN	8,70	7,88	17.969	8.777
KALIMANTAN TIMUR	10,22	9,27	17.958	6.943
KALIMANTAN UTARA	9,65	8,82	12.541	5.665
SULAWESI UTARA	9,51	9,47	14.898	9.980
SULAWESI TENGAH	9,07	8,58	12.990	7.729
SULAWESI SELATAN	8,63	8,15	15.893	9.822
SULAWESI TENGGARA	9,46	8,64	13.340	7.619
GORONTALO	7,53	8,09	14.079	5.252
SULAWESI BARAT	8,19	7,60	13.177	6.910
MALUKU	10,07	9,80	11.889	7.629
MALUKU UTARA	9,47	8,61	12.233	6.850
PAPUA BARAT	10,34	7,37	11.607	5.657
PAPUA	7,43	5,88	10.455	3.999
INDONESIA	8,90	8,07	15.463	9.004

## Lampiran 7. IPG Provinsi se-Indonesia Menurut Komponen Tahun 2020

Lanjutan

Provinsi	IPM		IPG
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(10)	(11)	(12)
ACEH	75,96	69,94	92,07
SUMATERA UTARA	75,91	68,83	90,67
SUMATERA BARAT	75,77	71,35	94,17
RIAU	77,25	68,09	88,14
JAMBI	75,87	67,08	88,41
SUMATERA SELATAN	73,77	68,15	92,38
BENGKULU	75,35	68,57	91,00
LAMPUNG	73,72	66,59	90,33
KEP. BANGKA BELITUNG	75,74	67,35	88,92
KEPULAUAN RIAU	79,27	73,97	93,31
DKI JAKARTA	83,66	79,17	94,63
JAWA BARAT	76,31	68,07	89,20
JAWA TENGAH	75,87	69,94	92,18
D I YOGYAKARTA	82,76	78,46	94,80
JAWA TIMUR	76,16	69,36	91,07
BANTEN	76,62	70,29	91,74
BALI	78,74	73,85	93,79
NUSA TENGGARA BARAT	72,69	65,75	90,45
NUSA TENGGARA TIMUR	69,16	64,13	92,73

## Lampiran 7. IPG Provinsi se-Indonesia Menurut Komponen Tahun 2020

Lanjutan

Provinsi	IPM		IPG
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(10)	(11)	(12)
KALIMANTAN BARAT	72,49	62,97	86,87
KALIMANTAN TENGAH	75,20	66,95	89,03
KALIMANTAN SELATAN	75,42	67,02	88,86
KALIMANTAN TIMUR	81,32	69,69	85,70
KALIMANTAN UTARA	75,41	65,36	86,67
SULAWESI UTARA	76,34	72,08	94,42
SULAWESI TENGAH	73,31	67,35	91,87
SULAWESI SELATAN	75,90	70,48	92,86
SULAWESI TENGGARA	75,87	68,66	90,50
GORONTALO	71,52	62,03	86,73
SULAWESI BARAT	70,21	62,79	89,43
MALUKU	73,01	67,88	92,97
MALUKU UTARA	73,69	65,99	89,55
PAPUA BARAT	72,79	60,35	82,91
PAPUA	65,99	52,52	79,59
INDONESIA	75,98	69,19	91,06

Lampiran 8. IDG Provinsi se-Indonesia Menurut Komponen Tahun 2020

Provinsi	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (Persen)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ACEH	11,11	52,73	34,83	63,47
SUMATERA UTARA	13,00	54,26	36,12	67,52
SUMATERA BARAT	4,62	58,97	37,57	58,28
RIAU	18,46	52,58	28,31	68,70
JAMBI	14,55	50,51	30,26	65,86
SUMATERA SELATAN	21,62	54,37	34,99	74,64
BENGKULU	16,28	51,90	35,24	70,48
LAMPUNG	20,00	53,05	29,52	69,06
KEP. BANGKA BELITUNG	4,44	51,70	26,89	53,03
KEPULAUAN RIAU	11,11	46,12	28,83	62,02
DKI JAKARTA	21,70	46,10	38,06	75,16
JAWA BARAT	20,83	43,02	30,10	70,24
JAWA TENGAH	18,80	50,20	34,29	71,73
D I YOGYAKARTA	18,18	53,69	40,82	74,73
JAWA TIMUR	18,33	49,65	35,81	73,03
BANTEN	17,65	43,97	31,74	68,76
BALI	16,36	49,12	38,55	72,16
NUSA TENGGARA BARAT	1,56	45,95	33,11	51,96
NUSA TENGGARA TIMUR	20,00	50,13	43,56	74,53

## Lampiran 8. IDG Provinsi se-Indonesia Menurut Komponen Tahun 2020

Lanjutan

Provinsi	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (Persen)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	IDG
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
KALIMANTAN BARAT	13,85	44,85	35,21	68,07
KALIMANTAN TENGAH	33,33	46,12	33,63	82,41
KALIMANTAN SELATAN	20,00	51,35	36,51	74,48
KALIMANTAN TIMUR	18,18	45,86	24,17	65,54
KALIMANTAN UTARA	14,29	42,17	26,58	64,31
SULAWESI UTARA	29,27	53,59	32,50	78,98
SULAWESI TENGAH	26,67	52,84	31,10	75,78
SULAWESI SELATAN	28,40	54,47	32,55	76,32
SULAWESI TENGGARA	19,05	49,63	36,27	72,54
GORONTALO	26,67	57,31	27,03	70,74
SULAWESI BARAT	11,11	53,26	36,57	65,92
MALUKU	23,26	53,12	37,22	75,54
MALUKU UTARA	26,67	46,84	36,75	77,28
PAPUA BARAT	14,29	41,49	27,82	62,17
PAPUA	14,55	35,48	36,61	66,72
INDONESIA	21,09	48,76	37,26	75,57



Sensus  
Penduduk  
2020

#MencatatIndonesia

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI MALUKU UTARA

Jl. Stadion No. 85 Ternate, Telp. (0921) 3127878 Fax. (0921) 3126301  
Homepage : <http://malut.bps.go.id> Email : [bps8200@bps.go.id](mailto:bps8200@bps.go.id)